

**Title: “Engaging Communities in a Just Transition through EITI Implementation Program ”**  
**Case Study: North Morowali – Central Sulawesi, Indonesia**

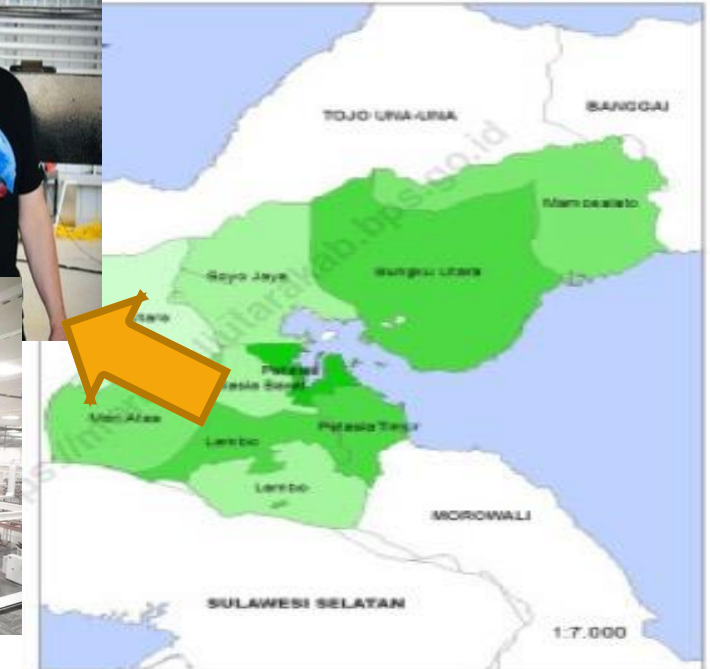
Team: PWYP-IDEA Yogyakarta



The global standard for the good governance  
of oil, gas and mineral resources.

## Konteks Lokal – Morowali Utara

Indicators	Year 2020	Year 2021	Notes
Total population	120.789	121.647	Increase slightly
Population Growth Rate	1,5%	1,5 %	Increase slightly
GRDP	11.160,86 billion	13.086,80 billion	Increase 10%
GRDP growth	-0.23%	10,47%	Significantly increase
Poverty rate	14.10%	13.90%	Slightly decreased
HDI	68,36	68,38	increase



- PDRB (harga konstan) pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 10,47 persen dari tahun 2020, dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan sebesar 91,31%, disusul oleh sektor Konstruksi sebesar 18,73%.
- Besarnya investasi di Sektor Pertambangan Bijih Logam dan Sektor Industri Logam Dasar yang saat ini berlangsung di Kabupaten Morowali Utara, serta pemekaran dan pengembangannya di Kabupaten Morowali akan berimplikasi pada peningkatan eksponensial Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak di Kabupaten Morowali. periode perencanaan 2021-2026 (Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026)



# Dampak dari Ekspansi Industri Nickel

- Konsesi IUP PT. Sumber Swarna Pratama (SSP) dan PT. Bumanik dianggap melakukan perambahan hutan tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
- Warga Desa Tiu yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan di Danau Tiu memprotes secara terbuka sehingga Bupati Kabupaten Morowali Utara perlu turun tangan untuk mendamaikan konflik antara warga dengan pemegang IUP.



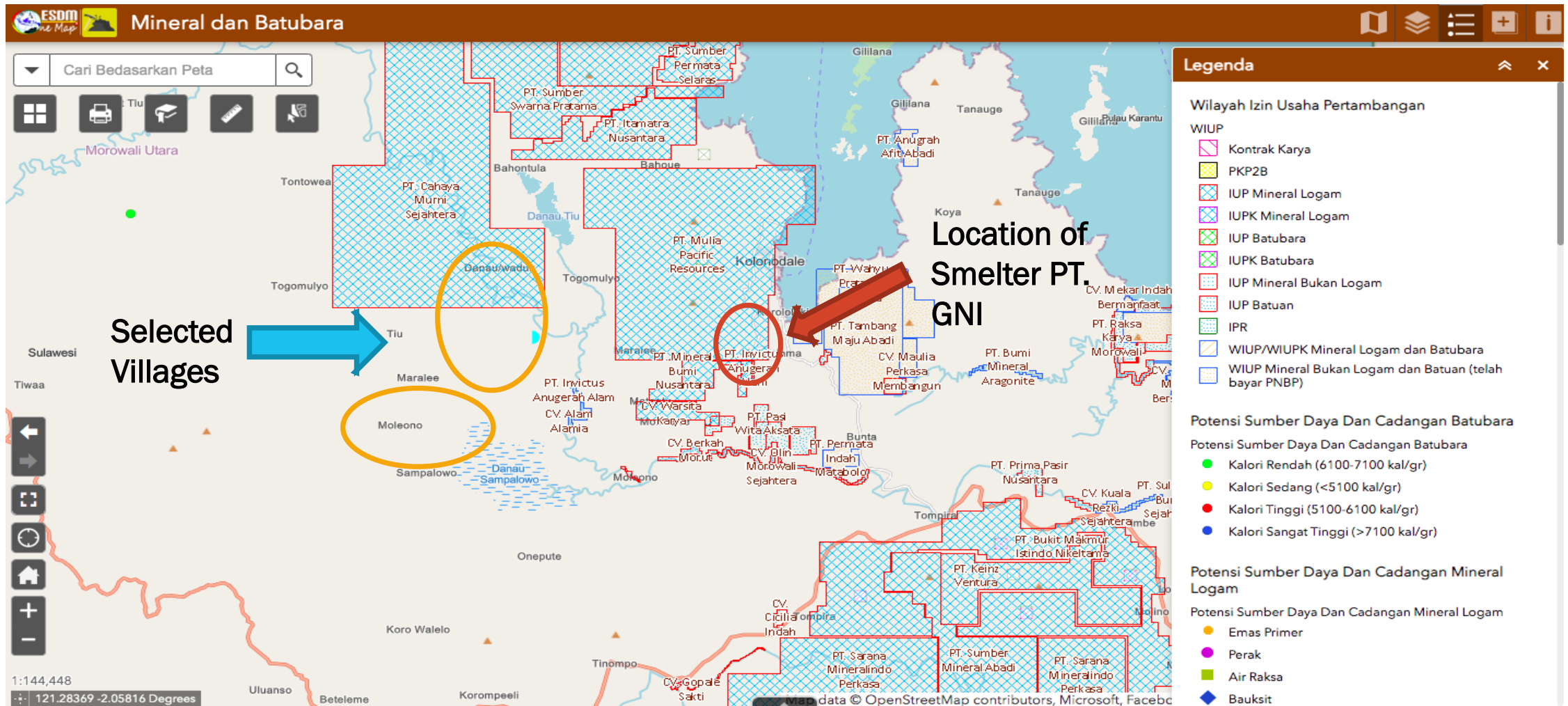


# Profil Komunitas

- Proses pemilihan masyarakat sasaran di Morowali Utara didasarkan pada data perbandingan antara Morowali dan Morowali Utara kemudian ke 3 desa/kelurahan yang dicalonkan di Kecamatan Petasia dan Petasia Barat; Komunitas/desa Tiu, Maralee dan Korolama.
- Akses ke lokasi dari Palu, ibu kota Sulawesi Tengah adalah 9 jam melalui jalan darat.
- Desa Tiu dan Maralee memiliki angka yang sama yaitu sangat dekat dengan IUP, dan penambangan liar. Desa Maralee dekat dengan pengembangan program terkait Proyek EBT di Kabupaten Morowali Utara.
- Pertimbangan utama dalam memilih komunitas terpilih di 2 desa:
  1. Dekat dengan kegiatan IUP pertambangan yang aktif beroperasi.
  2. Kedekatan dengan potensi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT)
  3. Memiliki karakteristik sosial masyarakat yang masih dapat didorong untuk mendukung tata kelola pertambangan dan EBT yang lebih baik karena memiliki kepentingan yang sama dengan program.
  4. Memiliki lokasi yang mudah dijangkau dan tersedianya kontak dengan masyarakat lokal yang dapat membantu memfasilitasi proses penguatan masyarakat dan advokasi kebijakan.



# Peta Komunitas



# Perbandingan Data dari 3 Desa:

Village data	Maralee village	Tiu village	Korololama village
Area in sq. km (%)	<b>45,52 (9,48%)</b>	<b>69,30 (14,43%)</b>	<b>45,28 (7,01%)</b>
Access	Land (car and motorcycle)	Land (car and motorcycle)	Land (car and motorcycle)
% of land/ hills / mountain	50/10/40	60/20/20	40/20/40
Number of sub-village area (Dusun)	3	6	4
Social Organization	2 (BPD dan PKK)	2 (BPD dan PKK)	2 (LMD dan PKK)
Population / % growth rate	549 (0,8%)	1.595 (1,28%)	1.007 (0,7%)
Population percentage / density per sq.km	<b>7,12/12,06</b>	<b>20,69/23,02</b>	<b>5,6/22,24</b>
Gender Ratio	<b>117</b>	<b>109</b>	<b>105,9</b>
Number of Schools elementary/JHS/SHS	1/1/1	1/0/0	1/0/1
Health Facility	1 Puskesmas	1 Puskesmas 1 Puskesmas Pembantu	1 Puskesmas 1 Praktek Dokter
Worship	1 Church	1 Mosque 2 Church	2 Church
Industry Big/ medium /Small/Household	0/0/1/10	0/0/0/20	0/0/4/13
Services	<b>5 carpenters, 1 tailor, 1 welding shop, 1 car repair shop, 1 motorcycle repair shop</b>	<b>15 carpenters, 1 tailor, 2 welding workshops, 2 motorcycle repair shops, 1 electronics service</b>	<b>34 carpenters, 2 tailors, 1 welding workshop, 4 motorcycle workshops</b>
PLN (Electricity) Customer (2020)	133	439	254
Market/Shop/Kiosk/Stall	0/0/5/0	1/1/28/2	1/1/23/8
Village Embung (food storage)	1	2	1
Number of BTS/Operator/ signal	<b>0/1/strong</b>	<b>1/1/ strong</b>	<b>0/2/ strong</b>
Village budget (APBDES) 2020 (IDR)	IDR 1.306.466.168	IDR 1.663.810.852	IDR 1.252.511.969
Taxpayer / PBB (land tax) Realization	369/IDR 3.687.027	951/IDR 17.543.051	../ IDR 1.252.511.969

# Sub-national data assesment

## Policy and institutional framework

- Dalam saluran informasi resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, semua informasi terkait regulasi tahapan pengelolaan sektor pertambangan sesuai dengan laporan EITI Pemerintah periode 2019-2020 **tidak tersedia**.

## Production volumes and values

- Penelusuran di website Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, informasi terkait dua perusahaan yaitu PT. CMS dan PT. SSP **tidak ditemukan**, begitu pula data terkait volume produksi dan nilai produksi kedua perusahaan tersebut.

## License and company information

- Data terkait izin usaha pertambangan yang diberikan oleh ESDM hanya digambarkan dalam profil perusahaan secara singkat, yaitu terbatas pada nama perusahaan, nomor kontrak, masa berlaku kontrak, jenis kontrak, dan wilayah konsesi yang diberikan. Data terkait dokumen kontrak IUP industri ekstraktif serta izin lingkungan atau dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) masih sulit diakses.

## Subnational budgets and revenue flows

- Dibandingkan dengan nilai proyeksi APBD, nilai realisasi sektor Minerba jauh tertinggal, dan juga berbeda dengan total realisasi berdasarkan data Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, dimana total DBH Sulteng adalah Rp. 181,436 miliar. Hal ini menunjukkan data penerimaan dan proyeksi penerimaan daerah penghasil pertambangan masih belum terintegrasi dengan pemerintah pusat.

## Broader economic contribution

- Sebaran tenaga kerja perempuan pada sektor pertambangan di Morowali Utara berdasarkan data keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2020 masih cukup kecil yaitu 1.090 tenaga kerja dibandingkan dengan total sebaran tenaga kerja perempuan yaitu 22.187 tenaga kerja, atau hanya 4,9% saja.

## Environmental and social impacts

- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten tidak bisa berbuat banyak karena kewajiban perusahaan untuk menjadikan UKL-UPL sebagai turunan dari Dokumen Amdal tidak dilaksanakan. Tim teknis perusahaan untuk mengurus hal ini atau biasa disebut KTT (Kepala Teknis Tambang) belum membuat dokumen UKL-UPL sehingga tidak ada dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil tindakan.



# What Community Said?

"Informasi tentang izin pertambangan berasal dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. mengenai energi terbarukan, pemerintah desa tidak mengetahui informasinya".

"Selama ini pemerintah desa hanya diundang melalui sosialisasi dari pemerintah provinsi hanya mengenai Amdal bagi perusahaan tambang".

Acil Helai (Kepala Desa Tiu, Kabupaten Morowali Utara)

"Saya tidak tahu tentang kebijakan dan rencana pemerintah selama ini"

Faria Natalis (Plt. Kepala Desa Maralee, Kabupaten Morowali Utara)

"Selama ini pemerintah tidak memiliki atau memegang dokumen izin perusahaan. Papan proyek terkait juga tidak tersedia"...

"Selama ini kami hanya mengenal petugas humas karena mereka sering datang ke kantor desa untuk konsultasi. Tapi karena Covid-19 tidak pernah datang."

Acil Helai (Kepala Desa Itu, Kabupaten Morowali Utara)

"Selama ini pemerintah desa tentang pembahasan anggaran sudah diberlakukan Pemda Morowali Utara di Kolonodale, tapi yang dibahas hanya dana desa, tidak pernah membahas anggaran pertambangan, kalau ada ini sebenarnya sangat baik untuk desa."

"Acil Helai (Kepala Desa Itu, Kabupaten Morowali Utara)

"Selama saya di kecamatan, kami mendapatkan informasi anggaran dari pemerintah daerah, tapi untuk pertambangan, setahu saya tidak ada."

Faria Natalis (Plt. Kepala Desa Maralee, Kabupaten Morowali Utara)





# How the Energy Transition is impacting communities

- Kebijakan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2050 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 menjadi dasar pengembangan Proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Data evaluasi kegiatan terkait Pengembangan Proyek EBT di daerah oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah pembangunan beberapa jenis pembangkit EBT berupa; biogas, revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pemasangan Solar Home System (SHS), pemasangan Lampu Solar Hemat Energi (LTSHE) dan pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS).
- Menurut masyarakat, pengelolaan tambang memiliki pendekatan pelibatan masyarakat yang sangat berbeda dengan pengembangan PLTA yang dilakukan di wilayah mereka. Saat itu masyarakat diajak dan diberikan pemahaman tentang pentingnya PLTA dan pentingnya dukungan masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan PLTA di wilayahnya. Saat itu, baik dinas terkait maupun kontraktor pembangunan PLTA mengundang masyarakat dan meminta masukan masyarakat terkait rencana pembangunan PLTA.
- Umumnya masyarakat awam di 2 desa sudah memahami penggunaan bahan tambang Nikel sebagai pelengkap produk baterai. Masyarakat berharap dampak eksploitasi tambang nikel secara masif di wilayahnya untuk proyek energi terbarukan memperhatikan dampak lingkungan dan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar tambang.

## Kenapa EBT tidak menjadi prioritas:

1. **Investasi pembangkit energi terbarukan masih mahal.**
2. **Penguasaan teknologi EBT yang terbatas.**
3. **Tarif listrik EBT belum menarik investor.**
4. **Rendahnya minat perbankan domestik untuk berinvestasi di pembangkit EBT.**
5. **Keberlanjutan bahan baku yang terjamin dan insentif untuk bahan bakar nabati**
6. **Insentif untuk konservasi energi masih terbatas**



Year	2022	2023	2024	2025	2026
Budget (Millions IDR)	4760,60	2829,51	3096,99	3795,48	4473,16
Target (% of NRE Development NRE) baseline 3% (2021)	4%	5%	6%	7%	8%



# Key Recommendations

1. *Diperlukan sosialisasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas di sektor sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, agar daerah dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang pertambangan, terutama untuk kebijakan terkait.*
2. *Perlu diintensifkan promosi terkait inisiatif EITI di tingkat daerah hingga tingkat kabupaten/kota dan desa agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendorong terselenggaranya seluruh rantai nilai EITI di tingkat daerah dan masyarakat.*
3. *Kementerian ESDM perlu mendorong dashboard untuk sarana transparansi dan akuntabilitas atas evaluasi pelaksanaan komitmen EITI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang juga dapat digunakan oleh masyarakat.*
4. *Perlu lebih sering diadakan forum multistakeholder di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota dengan melibatkan masyarakat.*
5. *Kementerian ESDM perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait terutama dalam mengatasi dampak pertambangan yang merusak lingkungan dan berdampak lebih lanjut terhadap kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar tambang.*
6. *Masyarakat di tingkat desa/masyarakat sekitar tambang sangat antusias jika difasilitasi dengan dashboard terkait data pertambangan yang merupakan bagian dari situs online masyarakat (Desa) yang dapat membantu menjawab pertanyaan seputar kejelasan izin pertambangan, izin lingkungan, dana CSR dan program ekonomi dan infrastruktur di tingkat desa.*